



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

KECAMATAN BANJARBARU SELATAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dari SKPD Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

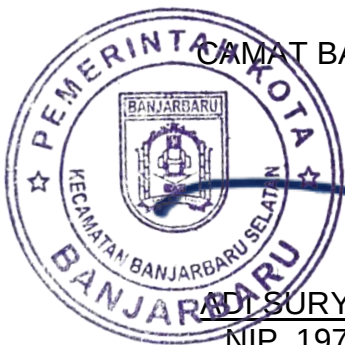
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2024 dari SKPD Kecamatan Banjarbaru Selatan ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi satuan kerja perangkat daerah, kondisi sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai..

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2025

CAMAT BANJARBARU SELATAN,



ADI SURYA NOOR, S.STP,M.AP
NIP. 19791212 199810 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Dasar Hukum ..	1
	1.1.1 Undang-undang Pembentukan Daerah	1
	1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	3
	1.2.1 Strategi dan arah kebijakan	3
	1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran	5
	1.2.3 Program dan Kegiatan	5
	1.3 Data Umum Daerah	6
	1.3.1 Kecamatan	6
	1.3.2 Kelurahan	7
	1.3.3 Kondisi Geografis Daerah	8
	1.3.4 Jumlah Kelurahan	9
	1.3.5 Jumlah Penduduk	9
	1.3.6 Jumlah Pegawai	10
	1.3.7 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja	16
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	19
BAB III	CAPAIAN KINERJA	21
BAB IV	PENUTUP	22
	A. Kesimpulan	22
	B. Strategi Peningkatan Kinerja	22

BAB I

PENDAHULUAN

LPPD Kecamatan Banjarbaru Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1.1 Undang-undang Pembentukan Daerah

1. Undang – undang Nomor 9 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah

- beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
 4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru ;
 6. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 241 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ;
 7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ;
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 tambahan lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) ;
 9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 62)

10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pelaksana Pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 di wilayah Kota Banjarbaru yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang, Visi pembangunan daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 adalah

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, berkaitan dengan Misi dan program kerja Wali Kota tahun 2021-2026, untuk mendukung tercapainya misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada salah satu misi Wali Kota ke-3 (tiga) **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah” dan mendukung sasaran nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.**

1.2.1 Strategi dan arah kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sesuai yang ada dalam Renstra dengan langkah-langkah sebagai kunci dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualias Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dengan sasaran Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah :

- Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi
- Melaksanakan Peningkatan Fasilitas pelayanan Publik dan tata laksana
- Melaksanakan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
- Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan sosialisasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Melaksanakan Musrenbang kelurahan
- Melaksanakan Pembangunan / Pemeliharaan Saprass Kelurahan
- Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (PKK kursus singkat dan pembinaan Kemasyarakatan berupa karang taruna, posyandu dll)
- Melaksanakan Evaluasi Kelurahan (pembinaan kelurahan Dan Lomba Kelurahan
- Melaksanakan Koordinasi Tokoh agama dan masyarakat dalam bentuk silaturahmi RT / RW / Tomas / Toga
- Melaksanakan pembinaan Kemasyarakatan
- Melaksanakan Monitoring, evaluasi, sosialisasi dan pengawasan fasilitas umum dan PKL
- Melaksanakan pembinaan dan lomba poskamling guna tercapai rendahnya kriminalitas

- Melaksanakan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan
- Melaksanakan Koordinasi urusan pemerintah umum tingkat kecamatan

1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

1. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, tujuan misi untuk Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Banjarbaru, untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan sasaran strategis :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- c. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Indikator Sasaran

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan yang merupakan proses perencanaan strategis, adapun sasaran dalam perencanaan strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kepatuhan Pelayanan
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan

1.2.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Banjarbaru Selatan terdapat penetapan program dan kegiatan antara lain :

A. Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Koordinasi Pelayanan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.3 Data Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pelaksana Pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru pada Nomenklatur Jabatan pelaksana pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru adalah :

1.3.1 Kecamatan

1.3.1.1 Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian

1. Pengadministrasian Kepegawaian
 2. Pengadministrasian Umum
 3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
 4. Pengadministrasian Perizinan
 5. Penyusunan kebutuhan Barang Inventaris
 6. Pramu Bakti
 7. Pengemudi
 - b. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan
 1. Analisis perencanaan , evaluasi dan pelaporan
 2. Bendahara
 3. Penata Laporan keuangan
 4. Pengadministrasian Keuangan
 5. Verifikator Keuangan
 6. Pengolah data
 7. Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah
- 1.3.1.2 Seksi – Seksi
- a. Seksi Pemerintahan
 1. Analis tata Praja
 2. Pemeriksa kependudukan
 3. Pengolah Data
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 1. Pranata Perlindungan Masyarakat
 2. Pengelola Dokumen perizinan
 - c. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan
 1. Analis Perizinan
 2. Pengolah Data
 3. Pengelola Kegiatan Survey dan perencanaan
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 1. Analis Kemasyarakatan
 2. Analis Pelayanan Sosial
 3. Pengelola Data

1.3.2 Kelurahan

1.3.2.1 Sekretariat

- a. Pengadministrasian Kepegawaian
- b. Pengelola Anggaran
- c. Pemelihara Sarana Dan Prasarana
- d. Penyusun kebutuhan Barang Inventaris
- e. Pramu bakti
- f. Pengemudi

1.3.2.1 Seksi – Seksi

- a. Seksi Pemerintahan
 1. Pemeriksa Kependudukan
 2. Analisis Pemantauan pertanahan
- b. Seksi Ekonomi dan pembangunan
 1. Analisis perizinan
 2. Pengelola Data
 3. Pengelola Kegiatan Survey dan perencanaan
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 1. Analisis Kemasyarakatan
 2. Penyuluh Kemasyarakatan

1.3.3 Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Banjarbaru Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan :

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan dua (2) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru;
 2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru;
- Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki luas wilayah 21,96 Km² berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin

1.3.4. Jumlah Kelurahan

Jumlah kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2007 terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu :

- Kelurahan Loktabat Selatan dengan luas wilayah 8.58 KM²
- Kelurahan Kemuning dengan luas wilayah 3.61 KM²
- Kelurahan Guntung Paikat dengan luas wilayah 2.47 KM²
- Kelurahan Sungai Besar dengan luas wilayah 7.30 KM²

Tabel. 1 Daftar RW dan RT masing-masing Kelurahan :

No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	2	3	4
1.	Loktabat Selatan	6	29
2.	Kemuning	5	26
3.	Guntung Paikat	5	29
4.	Sungai Besar	8	46

1.3.5 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Banjarbaru Selatan pada tahun 2024 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Banjarbaru Selatan Bulan Agustus 2024, yang Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah Laki-laki 24.146 jiwa dan Perempuan adalah 24.338 jiwa. Adapun rincian perKelurahan sebagai berikut :

Tabel. 2 data penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Loktabat Selatan	5.209	5.110	10.319
2.	Kemuning	5.156	5.358	10.514
3.	Guntung Paikat	4.446	4.484	8.930
4.	Sungai Besar	9.335	9.386	18.721
Jumlah		24.146	24.338	48.484

1.3.6 Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan sampai Bulan Desember 2023 berjumlah 79 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 53 orang
2. PTT/Kontrak : 26 orang

Jumlah PNS Kecamatan Banjarbaru Selatan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pegawai struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan pada tahun 2024 adalah :

Tabel.3 Data PNS pada Kecamatan Banjarbaru Selatan

No.	Nama	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
	Kecamatan Banjarbaru Selatan			
1.	ADI SURYA NOOR,S.STP,M.Si	Pembina TK.I (IV.b)	Camat	S-2
2.	SUHASMIN ALFISYAH, S.STP.M.Si	Pembina (IV.a)	Sekcam	S-2
3.	SALAHUDDIN AIYUBI, S.Sos	Penata TK I (III.d)	Kasi Kesos	S-1

4.	SRI BIMO ARINUGROHO, ST	Penata TK I (III.d)	Kasi Pem	S-1
5.	MIKE WASTIN, S.AP.M.A	Penata TK I (III.d)	Kasi Ekobang	S-2
6.	YULI HIDAYAT,ST	Penata TK I (III.d)	Kasi Terantib	S-1
7.	AI YENI NURUL AINI,S.Sos	Penata TK I (III.d)	Kasubbag Renkeu	S-1
8.	NOOR JANNAH,S.Sos	Penata TK I (III.d)	Kasubbag Umpeg	S-1
9	LIDIA ANGGERAINI, ST	Penata TK I (III.d)	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	S-1
10.	ANGGUN MAS,ST	Penata (III.c)	Pengelola Kegia.Survei dan Perencanaan	S-1
11.	BAKHTIAR	Penata Muda TK I (III.b)	Pranata Perlindungan Masyarakat	SMA
12.	ALFI PRASETYANING PUTRI,A.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Bendahara	D-3
13.	MITHA ANDONOWATIA.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Verifikator Keuangan	D-3
14.	FIRMAN MULTAZAM AZMI,A.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Pengelola Bahan Perencanaan	D-3
15.	NINA KHAIRUNNISA,A.Md	Pengatur TK I (II.d)	Pranata Komputer	D-3

			Pelaksana	
16.	KIKI LITAPIN,A.Md	Pengatur TK I (II.d)	Pranata Komputer Pelaksana	D-3
17.	RAYDA NOOR AMALYA,A.Md	Pengatur (II.c)	Pengelola Keuangan	D-3
18.	ALI FAJAR, A.Md.Kom	Pengatur (II.c)	Pengelola Keuangan	D-3
19.	SITI JUWARIYAH	Penata (III.c)	Pelaksana Kessos	S-1
	Kelurahan Loktabat Selatan			
20..	ASTRI MAYA SARI,S.STP,MAP	Penata TK I (III.d)	Lurah	S-2
21.	RISNA HANDAYANI, SE	Penata (III.c)	Sekretaris	S-1
22.	NETA PAHRIATI, S.Pi	Penata TK. I (III.d)	Kasi Pem	S-1
23.	NOOR KAMALIYAH, SE	Penata Muda TK. I (III.b)	Kasi Ekobang	S-1
24.	JUNAIDI,S.AP	Penata Muda TK I (III.b)	Kasi Kessos	S-1
25.	VINASTUTI NUR SARI,A.Md	Penata Muda (III.a)	Pranata Komputer	D-3
26.	DWIDJO SUSANTO	Pengatur (II.c)	Pengelola data Pertanahan	SMKN
27.	RUT ERIKA,A.Md,A.Md.Ak	Pengatur (II.c)	Pengelola Anggaran	D-3
	Kelurahan Kemuning			
28.	DONI FAJAR SAPUTRA, S.STP.M.Si	Penata TK. I (III.d)	Lurah	S-2
29.	NILA SUBHIYANTI, S.AP	Penata TK. I (III.d)	Sekretaris	S-1

30.	MUHAMMAD HENDRA GUNAWAN,SSTP	Penata Muda TK I (III.b)	Kasi Pem	D-4
31.	RATNA,SE	Penata TK I (III.d)	Kasi Ekobang	S-1
32.	MARIYANI,S.Sos	Penata TK I (III.d)	Kasi Kessos	S-1
33.	PATHURRAHMAN,A.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Pengelola Keuangan	D-3
34.	WIWIT PATRICIA, A.Md	Penata (III.c)	Pengelola Data Pelayanan	D-3
35.	FATHURRAHMAN	Penata (III.c)	Pengelola Data	S-1
36.	MUHAMMAD SYARIF FADILLAH,A.Md.A.B	Pengatur (II.c)	Pengelola Dokumen Perizinan	D-3
37.	LISDA LIYANTI,A.Md.A.B	Pengatur (II.c)	Pengelola Dokumen Perizinan	D-3
	Kelurahan Guntung Paikat			
38.	MUHAMMAD ARIFIN,S.AP	Penata (III.c)	Lurah	S-1
39.	AGUS SYAULANOR RAHIM, A.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Plt. Sekretaris	D-3
40.	FAKHRIZAL,A.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Kasi Pem	D-3
41.	BENYAMIN UHIL,SE	Penata Muda TK I (III.b)	Kasi Kessos	S-1
42.	H. YUDI NOPRIHAN, SE.MM	Penata (III.c)	Ekobang	S-2
43.	HASANAHA,A.Md	Penata Muda (III.a)	Pranata Komputer Pelaksana	D-3
44.	RIZQYANA AMALIA,A.Md,A.B	Pengatur (II.c)	Pengelola Dokumen	D-3

			Perizinan	
	Kelurahan Sungai Besar			
45.	ANINDYA RISA DESTIANA,SIP	Penata TK I (III.d)	Lurah	S-1
46.	ARIF RIFALDY,S.Sos	Penata (III.c)	Sekretaris	S-1
47.	TAUPIK RAHMAN,SE	Penata TK I (III.d)	Kasi Pem	S-1
48.	ETTY NOER SA'ADAH, SE	Penata (III.c)	Kasi Ekobang	S-1
49.	Hj.RITA KHAIRANI,S.AP	Penata TK I (III.d)	Kasi Kessos	S-1
50.	ROBY INDRAJAYA,AMd	Pengatur TK I (II.d)	Pranata Komputer Pelaksana	D-3
51.	SARIDAH	Pengatur TK I (II.d)	Pengolah Data	SMEA
52.	LESA FARIANA	Pengatur TK I (II.d)	Pengelola Anggaran	SMA
53.	SRI SUYATMI	Pengatur TK I (II.d)	Pengolah Data Pelayanan	SMEA

Dari uraian tabel dapat diatas kualifikasi berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan adalah :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 6 orang
- S-1 : 23 orang
- D-4 : 1 orang
- D-3 : 18 orang
- SLTA : 5 orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 1 orang
- Penata Tk.I (III/d) : 16 orang

- Penata (III/c) : 9 orang
- Penata Muda Tk.I (III/b) : 11 orang
- Penata Muda (III/a) : 2 orang
- Pengatur Tk.I (II/d) : 6 orang
- Pengatur (II/c) : 7 orang

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 1 orang
- Eselon IV/a : 8 orang
- Eselon IV/b : 18 orang

4. Berdasarkan Pejabat Fungsional

- Tidak ada

Tabel.4 Data PTT/Kontrak pada Kecamatan Banjarbaru Selatan
berdasarkan Pendidikan

No.	Nama	Pendidikan
1	2	3
1.	HERRY MAULANA	SMU
2.	ROFIK HIDAYAT, SE	STM
3.	YUDHA HENDRAWAN	SMA
4.	HERLINA WATI, S.Hut	S1
5.	PRIBADI EDI T,S.Sos	S1
6.	MAHRIFAN NOOR, S.Sos	S1
7.	ELVI DESRIANTI, S.Sos	S1
8.	HERNAWAN, SE	S1
9.	SITI KUMALA SARI, SH	S1
10.	DWI NORMAYANTI	SLTA
11.	AYUNINGTYAS RAMADHANIANI	SLTA
12.	M. IRWAN EGI Rianto	SLTA

13.	MURYANINGSIH, S.Sos	S1
14.	NUR RINA YUNINGSIH	SLTA
15.	MAHA RANNY SEFTIANA	SLTA
16.	VONYKA KURNIA RAMADHANI, S.Pd	S1
17	RHOSY PANANI, S.Kom	S1
18.	SULASMI, S.Hut	S1
19.	IDA ARIYANI,S.Ikom	S1
20.	NABILA AULIA RAHMI, S.Kom	SLTA
21.	MEGA LESTYANA, S.Pd	S1
22.	M.HAIRIFANSYAH	SLTA
23.	RATIH WULANDARI, SE	SLTA
24.	AMRIZALDY	S1
25	NOORIDA TAUFANI, S.Pd	S1
26	MUHAMMAD FAJERIN MUHARRAM	SLTA

1.3.7 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Belanja langsung untuk tahun anggaran 2024 dipergunakan untuk membiayai 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan pada Kecamatan Banjarbaru Selatan Total APBD Murni sebesar Rp. 12.725.535.559,- kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp. 15.476.281.742,- sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp. 15.092.636.751,- atau 97,52%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program / Kegiatan	Target (rupiah)	Realisasi(rupiah)	(%)
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.183.892,-	9.121.628.371,-	98,38%
a.	Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	284.136.900,-	281.287.928,-	99,00%
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16.516.900,-	13.667.928,-	82,75%
-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	267.620.000,-	267.620.000,-	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.488.745.672,-	6.427.759.272,-	99,06%
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.466.115.772,-	6.405.129.372,-	99,06%
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8.499.900,-	8.499.900,-	100%
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14.130.000,-	14.130.000,-	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.700.000,-	7.700.000,-	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.700.000,-	7.700.000,-	100%
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.450.000,-	313.231.114,-	96,54%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	116.000.000,-	115.497.500,-	99,57%
-	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.348.000,-	4.420.000,-	69,63%
-	Penyediaan bahan logistik kantor	107.895.000,-	103.285.000,-	95,73%
-	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	6.000.000,-	6.000.000,-	100%
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,-	1.005.000,-	50,25%
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	86.207.000,-	83.023.614,-	96,31%
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.444.594.120,-	1.440.565.000,-	99,72%
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1.160.000.000,-	1.158.000.000,-	99,83%
-	Pengadaan Mebel	36.387.000,-	35.685.000,-	98,07%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.994.000,-	126.200.000,-	99,37%

-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.213.120,-	120.680.000,-	99,56%
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.070.400,-	177.723.427,-	96,03%
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.000.000	58.948.353	93,57
-	Penyediaan jasa layanan umum kantor	120.070.400	118.775.074	97,30
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	537.486.800,-	473.361.630,-	88,07%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	86.104.050,-	52.409.930,-	60,87%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	131.277.750,-	103.340.700,-	78,72%
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.800.000,-	9.800.000,-	100%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	304.305.000,-	301.811.000,-	99,18%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6.000.000,-	6.000.000,-	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.290.756.000,-	2.255.598.700,-	98,47%
a.	Koordinasi Pelayanan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	2.077.359.000,-	2.042.434.000,-	98,32%
-	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait	16.944.000,-	16.944.000,-	100%
-	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	2.060.415.000,-	2.025.490.000,-	98,30%
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Di limpahkan Kepada Camat	213.397.000,-	213.164.700,-	99,89%
-	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	40.000.000,-	39.767.700,-	99,42%
-	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	133.397.000,-	133.397.000,-	100%
-	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	40.000.000,-	40.000.000,-	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	124.341.500	95.556.150	76,85%
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.000.000,-	20.000.000,-	100%

-	Evaluasi kelurahan	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
b.	Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Kelurahan	104.341.500,-	75.556.150,-	72,41%
-	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	104.341.500,-	75.556.150,-	72,41%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.600.000,-	145.600.000,-	100%
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.600.000,-	145.600.000,-	100%
-	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	145.600.000,-	145.600.000,-	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.500.000,-	11.500.000,-	100%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Camat	11.500.000,-	11.500.000,-	100%
-	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	11.500.000,-	11.500.000,-	100%
	Total	11.884.381.392,-	11.629.883.221,-	98,19%

KELURAHAN LOKTABAT SELATAN

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	465.9320.850,-	432.265.826,-	92,77%
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.029.000,-	2.029.000,-	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.029.000,-	2.029.000,-	100%
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.670.000,-	127.200.393,-	88,54%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,-	14.800.000,-	98,67%
-	Penyediaan bahan logistik kantor	75.567.000,-	74.637.000,-	98,77%
-	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	4.065.000,-	4.065.000,-	100%
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,-	2.400.000,-	100%
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	46.638.000,-	31.298.393,-	67,11%
C.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.768.000,-	46.470.000,-	99,36%
-	Pengadaan Mebel	4.420.000,-	4.420.000,-	100%

-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.348.000,-	42.050.000,-	99,30%
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.400.000,-	72.258.308,-	88,63%
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.200.000	41.058.308	74,38%
-	Penyediaan jasa layanan umum kantor	31.200.000	31.200.000	100%
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.065.850,-	184.308.125,-	98,53%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	46.990.850-	44.908.125,-	95,57%
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.500.000,-	3.500.000,-	100%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	132.575.000,-	131.900.000,-	99,49%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4.000.000,-	4.000.000,-	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	100%
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	100%
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000,-	140.000.000,-	100%
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	285.000.000,-	285.000.000,-	100%
	Total	890.932.850,-	857.265.826,-	96,22
KELURAHAN KEMUNING				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	465.9320.850,-	432.265.826,-	92,77%
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.122.000,-	2.122.000,-	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.122.000,-	2.122. 000,-	100%
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.605.950,-	118.105.723,-	94,78%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	100%
-	Penyediaan bahan logistik kantor	72.637.500,-	69.467.500,-	95,64%
-	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	4.399.450,-	4.399.450,-	100%

-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,-	1.998.000,-	99,90%
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.569.000,-	36.240.773,-	91,59%
C.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.719.800,-	75.225.000,-	98,05%
-	Pengadaan Mebel	18.980.000,-	17.825.000,-	93,91%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.739.800,-	42.400.000,-	99,20%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,-	15.000.000,-	100%
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.800.000,-	60.328.073,-	78,55%
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.600.000	29.128.073	63,88%
-	Penyediaan jasa layanan umum kantor	31.200.000	31.200.000	100%
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.841.150,-	233.255.500,-	99,32%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	53.991.150-	52.825.500,-	97,84%
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.850.000,-	4.850.000,-	100%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	170.000.000,-	169.580.000,-	99,75%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6.000.000,-	6.000.000,-	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	100%
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	100%
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000,-	140.000.000,-	100%
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	285.000.000,-	285.000.000,-	100%
	Total	940.088.900,-	914.036.296,-	97,23
KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	451.755.700,-	430.442.476,-	95,28%
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.035.600,-	2.035.600,-	100%

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.035.600,-	2.035.600,-	100%
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.950.500,-	113.211.803,-	92,83%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.981.000,-	5.981.000,-	100%
-	Penyediaan bahan logistik kantor	70.000.500,-	62.939.500,-	89,91%
-	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	4.400.000,-	4.400.000,-	100%
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,-	2.000.000,-	100%
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.569.000,-	37.891.303,-	95,76%
C.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.412.000,-	26.250.000,-	99,39%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.412.000,-	26.250.000,-	99,39%
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.781.600,-	91.010.573,-	89,42%
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.581.600	59.810.573	84,74%
-	Penyediaan jasa layanan umum kantor	31.200.000	31.200.000	100%
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.576.000,-	197.934.500,-	99,18%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	48.576.000-	47.216.800,-	97,20%
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	140.000.000,-	139.717.700,-	99,80%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6.000.000,-	6.000.000,-	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	99,90%
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425.000.000,-	424.589.476,-	99,90%
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000,-	139.939.500,-	99,96%
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	285.000.000,-	284.649.976,-	99,88%
	Total	876.755.700,-	855.031.952,-	97,52 %

KELURAHAN SUNGAI BESAR				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	499.122.900,-	486.419.456,-	92,77%
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.029.000,-	2.029.000,-	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.029.000,-	2.029.000,-	100%
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.284.000,-	137.714.469,-	98,87%
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
-	Penyediaan bahan logistik kantor	87.875.000,-	87.115.000,-	99,14%
-	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	4.840.000,-	4.840.000,-	100%
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,-	1.560.000,-	78,00%
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.569.000,-	39.199.469,-	99,07%
C.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.161.400,-	99.471.000,-	99,31%
-	Pengadaan Mebel	43.127.400,-	42.735.000,-	99,09%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.372.000,-	45.074.000,-	99,34%
-	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.662.000,-	11.662.000,-	100%
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.744.000,-	43.234.987,-	83,56%
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.144.000	21.634.987	71,77%
-	Penyediaan jasa layanan umum kantor	21.600.000	21.600.000	100%
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.904.500,-	203.970.000,-	99,06%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	52.453.500-	51.150.000,-	97,51%
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.000.000,-	4.000.000,-	100%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	146.451.000,-	145.830.000,-	99,58%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3.000.000,-	2.990.000,-	99,67%

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	100%
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425.000.000,-	425.000.000,-	100%
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000,-	140.000.000,-	100%
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	285.000.000,-	210.000.000,-	73,68%
	Total	924.122.900,-	836.419.456,-	90,51

Bab II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp.8.017.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 8.499.900,- menjadi Rp.16.516.900,-.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 494.218.703,- pagu sebelum perubahan Rp. 5.971.897.069,- menjadi Rp.6.466.115.772,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terjadi penambahan Rp. 21.207.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 65.000.000,- menjadi Rp. 86.207.000,-.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terjadi penambahan Rp. 1.160.000.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 0,- menjadi Rp.1.160.000.000,-.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terjadi penambahan Rp.63.606.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 63.388.000,- menjadi Rp.126.994.000,-.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terjadi penambahan Rp. 103.287.680,- pagu sebelum perubahan Rp. 17.925.440,- menjadi Rp. 121.213.120,-.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terjadi Penambahan sebesar Rp. 5.180.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 116.890.400,- menjadi Rp. 122.070.400,-.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terjadi penambahan sebesar Rp. 304.305.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 0,- menjadi Rp. 304.305.000,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan terjadi pengurangan sebesar Rp. 236.900.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 2.297.315.000,- menjadi Rp. 2.060.415.000,-.
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan terjadi penambahan sebesar Rp. 10.000.000,- pagu sebelum perubahan Rp. 123.397.000,- menjadi Rp. 133.397.000,-

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Banjarbaru Selatan sesuai dengan sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Capaian Kecamatan Banjarbaru Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88,19	100,79
		Indeks Kepatuhan Pelayanan	82,5	66,6	80,73
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	11	92
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100	100	100
4	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100	100	100

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan banjarbaru Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarbaru Selatan . Pada Tahun 2024 Kecamatan Banjarbaru Selatan melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan setelah perubahan adalah Rp. 15.476.281.742,- realisasi keseluruhan Rp. 15.092.636.751,- dengan persentase 97,52%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Banjarbaru Selatan telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dengan baik, Pencapaian 3 sasaran strategis telah tercapai sesuai dengan target, untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 adalah 88,19 atau 100.79% dari target 87.5 dengan kategori **Baik** dan Indeks Kepatuhan Pelayanan pada tahun 2024 adalah 66.6 dari target 82.5 atau 80.73% dengan Predikat **Tingkat Kepatuhan Sedang**. Untuk Indikator jumlah RT Mandiri dengan target sesuai SK Wali Kota telah mendapat bantuan sosial dana kepada pokmas yang berada dalam tiap-tiap kelurahan adalah 3 Rt dan ada 3 pokmas maka di Kecamatan Banjarbaru Selatan 12 Rt yang terdiri 12 pokmas telah dipilih untuk mendapatkan bantuan sosial dana, tetapi ada 1 pokmas yang mengundurkan diri pada Kelurahan Sungai Besar dikarenakan yang akan mengelola pokmas tersebut pindah ke jawa sehingga pokmas tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi sehingga hanya 11 Pokmas yang terlaksana dengan persentase hasil 92%. Pada indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum telah terdapat sesuai target yaitu 100% juga pada persentase koordinasi yang terlaksana mendapat sesuai target yaitu 100%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Meningkatkan Kinerjanya sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh.
2. Melalui Kominfo akan lebih aktif mempublikasikan dan mensosialisasikan Aplikasi Lapor kepada masyarakat.
3. Memberikan standar mutu dan tolak ukur kinerja pelayanan publik.
4. Memberikan pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi yang berkembang.
5. Melaksanakan Inovasi dalam Pelayanan.
6. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap SOP (Standar Operasioanl Prosedur) secara berkala.
7. Adanya kesesuaian antara produk pelayanan yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diterima.

Banjarbaru, 17 Januari 2025

KAMAT BANJARBARU SELATAN,



ADI SURYA NOOR, S.STP,M.AP
NIP. 19791212 199810 1 002